

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Kencana. Jakarta
- Achmad Ruslan. 2013. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah di Republik Indonesia*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.
- , 2001. *Teori dan politik konstitusi*. Dirjen DIKTI DEPDIKNAS. Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 2001. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- I Putu Gelgel. 2021. *Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal*. UNHI Press. Denpasar.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Josep Riwo Kaho. 2004. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- M. Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Total media. Yogyakarta.
- Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Mas Bakar. 2010. *Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi*. Rangkang Education. Yogyakarta.

Ni'matul Huda.2005. *Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

Philipus M. Hadjon (dkk). 1994 Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Piran wroatmojo. 2001. *Otonom Daerah dan Pembangunan Daerah, Lembaga Administrasi Negara*. Jakarta.

Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.

Rusdianto Sesung. 2013. *Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewah, dan Daerah Otonomi Khusus)*. Refika Aditama. Surabaya.

Jurnal

Herman, "Bestuurszorg Pemerintah dalam Negara Hukum Indonesia", Jurnal Esensi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 1, Nomor 1 Desember 2019, hlm. 5

Latifah Amir, "Rencana Salah Satu Instrumen Hukum Administrasi Dalam Menentukan Tujuan Pemerintahan", Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Vol. 2, Nomor 2 November 2018, hlm. 32

Mohamad Rifan, Hilmi Inaya Fikriya, "Disharmonisasi Periode Pemberlakuan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Di Indonesia (Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata)", Jurnal Kepariwisata, Vol. 14 Nomor. 2 Desember 2020, hlm. 150

Ni matul Huda, "Kedudukan peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan

Perundang-Undangan”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Fakultas hukum UII, ol.13, Nomor 1 Januari 2016.

Rokilah, “The Role Of The Regulations In Indonesia State System, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 Nomor. 1 Juni 2020, hlm 34

Sapto Budoyo, ”Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Ilmiah CIVIS, Fakultas Hukum Unpgris, Vol. 2, Nomor 2 Juli 2014.

Sobirin Malian, ”Pro Dan Kontra Gbhn: Amandemen Sebagai Jalan Tengah”, Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Vol. 13, Nomor 2 2016.

Suriyati Hasan, ”Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional”, Meraja Jurnal, Stia Al Gazali Barru, Vol. 1, Nomor 3 November 2018,

V. Hadiyono, ”Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya”, Jurnal Politik Hukum dan Kekuasaan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Vol. 1, Nomor 1 Agustus 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025.

Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-
2027.

Perda Provinsi Jawa Timur No. 05 Tahun 2016 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2016-2031.

Perda Sulsel Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030.

Internet

“Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan:
Harmonisasi Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-
Undangan Lainnya”
[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&
view=article&id=422:harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-
perundang-undangan-lainnya&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=422:harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&catid=100&Itemid=180&lang=en)
(diakses pada 02 Februari 2023, Pukul 15.21)